Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Vol. 5, No. 2, April 2026, pp. 1159-1172
http://journal.amorfati.id/index.php/amorti | | ISSN 2962-9209

Interdisciplinary Scope of Contemporary Islamic Studies • Interdisciplinary Islamic Education • Interdisciplinary Islamic Law, Ethics, and Fatwa Studies • Interdisciplinary Islamic Economics, Finance, and Philanthropy • Islam, Society, and Culture • Islam, Politics, Governance, and Public Policy • Islam, Gender, Family, and Human Rights • Islam, Media, Communication, and Digital Da'wah • Islam, Health, Environment, and Sustainable Development • Islam, Science, Technology, Artificial Intelligence, and Digital Transformation

Resiliensi Masyarakat Sipil Dalam Fragmentasi Lokal: Kasus Gerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu

Muhammad Riyan Fitria Ramdlani [a,1,*], M. Musa Al Hasyim [b,2],

[*a] Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
[b] Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
[1]muhammad.ramdlani@unsoed.ac.id; [2]m.musa@unsoed.ac.id
*Correspondent Author; Email Author

ARTICLE INFO

Article history
Received:
15-02-2026
Revised:
25-03-2026
Accepted:
07-04-2026

Keywords
resiliensi masyarakat sipil,
fragmentasi politik-ekonomi,
Pati,
Pajak daerah,
tambang illegal.

ABSTRACT

Krisis politik-ekonomi di tingkat lokal sering kali melahirkan dinamika baru dalam relasi antara masyarakat sipil dan negara. Artikel ini menelaah resiliensi masyarakat sipil melalui studi kasus Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Jawa Tengah yang muncul sebagai respons terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250% dan polemik tambang ilegal di wilayah Sukolilo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder dari media, dokumen kebijakan, serta laporan advokasi. Penelitian ini memetakan strategi adaptif masyarakat sipil dalam menghadapi fragmentasi politik dan ekonomi lokal. Hasil riset menunjukkan bahwa masyarakat Pati mengembangkan beragam strategi adaptif seperti mobilisasi massa melalui demonstrasi publik, penggalangan donasi, audiensi dengan DPRD, pembentukan tim hukum, serta pemanfaatan momentum simbolik Hari Tani dengan memperluas legitimasi gerakan. Fragmentasi politik terlihat dari ketegangan antara bupati, DPRD, dan warga, sementara fragmentasi ekonomi tercermin dalam ketidakadilan distribusi beban pajak dan konflik kepentingan sumber daya alam. Meski pemerintah akhirnya berhasil mendorong pembatalan kenaikan pajak dan memunculkan Panitia Khusus Hak Angket DPRD namun tuntutan struktural masyarakat terhadap akuntabilitas dan tata kelola lingkungan masih berlanjut. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas advokasi dan jejaring masyarakat sipil lokal serta studi komparatif dan longitudinal untuk memahami keberlanjutan resiliensi pasca-krisis di berbagai daerah.

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, krisis politik-ekonomi di tingkat lokal menunjukkan eskalasi yang signifikan, terutama di wilayah-wilayah dengan ketergantungan tinggi pada sumber daya alam dan pendapatan pajak daerah. Desentralisasi fiskal yang diharapkan mampu memperkuat kemandirian daerah justru menimbulkan tekanan baru bagi pemerintah lokal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya, berbagai kebijakan fiskal seperti penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sering kali diterapkan tanpa mempertimbangkan daya dukung ekonomi warga serta keadilan distribusi beban pajak (Hadiz, 2010). Dalam konteks ini, eksploitasi sumber daya alam dan kebijakan fiskal yang eksploitatif memperburuk ketimpangan ekonomi serta memperlemah legitimasi politik pemerintah daerah. Fenomena tersebut dapat dilihat di sejumlah daerah seperti Blora, di mana polemik izin tambang dan kenaikan retribusi desa memicu ketegangan antara warga dan aparat lokal (Berita Jateng, 2025), maupun di Lumajang, tempat konflik agraria akibat tambang pasir hitam memunculkan gelombang protes petani. Masyarakat kecil seringkali menjadi korban pertama dari kebijakan yang hanya menguntungkan elit dan kalangan tertentu saja (Surabaya Kompas, 2025).

Krisis di tingkat lokal tersebut memperlihatkan bagaimana hubungan antara masyarakat sipil dan negara tidak bersifat statis, melainkan bertransformasi secara dinamis melalui pola resistensi dan adaptasi. Ketika kebijakan pemerintah dianggap mengancam kepentingan publik atau merugikan kelompok marjinal, masyarakat sipil kerap muncul sebagai aktor alternatif yang memainkan peran korektif terhadap negara (Carothers & Brechenmacher, 2014). Fenomena ini tampak dari meningkatnya berbagai bentuk gerakan masyarakat sipil di daerah—mulai dari advokasi lingkungan di Rembang yang menolak pembangunan pabrik semen, hingga gerakan warga di Kulon Progo yang menolak proyek tambang pasir besi (Suraya & Lowe, 2007). Gerakan-gerakan tersebut tidak hanya menuntut perubahan kebijakan, tetapi juga menunjukkan kapasitas adaptif masyarakat dalam mempertahankan ruang demokrasi di tengah tekanan politik dan ekonomi.

Konteks serupa juga tampak jelas di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dengan munculnya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) sebagai respons terhadap dua isu utama yakni kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250% pada Agustus 2025 dan polemik tambang ilegal di wilayah Sukolilo. Kebijakan kenaikan pajak yang dilakukan tanpa mekanisme konsultasi publik menimbulkan gejolak sosial di berbagai desa karena dianggap membebani petani kecil dan pelaku ekonomi rakyat (Detik, 2025). Kenaikan pajak yang mendadak ini menaikkan intensitas massa yang akhirnya berujung pada kericuhan sosial.

Sementara itu, praktik tambang ilegal di Sukolilo yang melibatkan kepentingan elite politik dan pengusaha lokal memperlihatkan bentuk lain dari fragmentasi ekonomi-politik di tingkat daerah, di mana keuntungan sumber daya tidak mengalir kepada masyarakat tetapi terkonsentrasi pada segelintir aktor (Purwoko, 2023). Dalam situasi demikian, AMPB tampil sebagai wujud resiliensi masyarakat sipil yang berupaya mempertahankan ruang partisipasi, menuntut akuntabilitas pemerintah daerah, serta menolak bentuk-bentuk eksploitasi yang mengancam kesejahteraan kolektif warga Pati.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain studi kasus tunggal, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika sosial dan politik di balik munculnya gerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) sebagai bentuk resiliensi

masyarakat sipil di tingkat lokal. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelusuri makna, strategi, serta konteks sosial yang melatarbelakangi tindakan kolektif warga secara holistik.

Lokasi penelitian difokuskan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yaitu daerah dengan karakter ekonomi agraris dan sejarah panjang keterlibatan masyarakat dalam isu-isu sumber daya alam dan kebijakan fiskal daerah. Pati dipilih karena menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan pajak dan aktivitas ekonomi ekstraktif menimbulkan respon sosial yang terorganisasi dari masyarakat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, meliputi pemberitaan media lokal dan nasional terkait polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dan tambang ilegal di Sukolilo, dokumen kebijakan daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) tentang PBB, laporan hasil rapat dan rekomendasi DPRD Kabupaten Pati, serta dokumen advokasi AMPB yang memuat kronologi aksi, tuntutan masyarakat, dan hasil audiensi dengan pemerintah daerah. Seluruh data dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola strategi adaptif dan bentuk resiliensi masyarakat sipil dalam menghadapi fragmentasi politik-ekonomi lokal.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis yang saling melengkapi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika gerakan masyarakat sipil di Kabupaten Pati. Pertama, digunakan analisis wacana dan narasi untuk menelusuri bagaimana konstruksi makna gerakan dibangun oleh para aktor masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan media. Melalui teknik ini, penelitian ini berusaha memahami bagaimana isu kenaikan PBB-P2 dan tambang ilegal di Sukolilo diproduksi, disebarluaskan, serta dimaknai sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi dan politik yang memerlukan respons kolektif.

Kedua, penelitian ini menerapkan analisis jaringan untuk memetakan kolaborasi antaraktor dalam gerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Teknik ini digunakan untuk melihat bagaimana jejaring solidaritas terbentuk antara warga, aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga formal seperti DPRD, serta bagaimana jaringan tersebut memperkuat kapasitas resiliensi kolektif dalam menghadapi fragmentasi kekuasaan lokal.

Ketiga, triangulasi sumber guna memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai jenis data—seperti pemberitaan media, dokumen kebijakan, serta laporan advokasi—untuk menghindari bias interpretasi dan memastikan bahwa hasil analisis mencerminkan realitas sosial secara lebih akurat.

Hasil dan Pembahasan

1. Latar Sosial Politik Kabupaten Pati

Kabupaten Pati, sebagai salah satu wilayah di Jawa Tengah, memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang unik. Hal ini sangat memengaruhi bagaimana dinamika politik lokal. Secara historis, struktur ekonomi Pati sangat bergantung pada sektor agraris, terutama pertanian padi dan hortikultura, yang menjadi sumber penghidupan mayoritas penduduk desa (BPS Kabupaten Pati, 2023). Ketergantungan ini menjadikan masyarakat lokal sangat rentan terhadap kebijakan

fiskal yang tidak proporsional dan fluktuasi harga komoditas pertanian. Selain itu, sektor pertanian di Pati sering kali menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pasar yang terbatas, serta kesenjangan pengetahuan dan teknologi pertanian, yang memperkuat ketergantungan warga pada praktik ekonomi subsisten dan mekanisme solidaritas komunitas (Hadiz, 2010).

Selain sektor agraris, Pati juga memiliki potensi sumber daya alam non-agraris, seperti tambang pasir, batu kapur, dan batu kali di beberapa wilayah, termasuk Sukolilo. Eksploitasi sumber daya ini sering dikaitkan dengan kepentingan elit politik lokal yang memanfaatkan pengaruh mereka untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Relasi antara elite politik dan kepentingan ekonomi tambang membentuk jaringan patronase yang kompleks, di mana izin pertambangan dan pengawasan regulasi seringkali dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Purwoko, 2023). Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketimpangan dalam distribusi keuntungan, tetapi juga menimbulkan konflik dengan masyarakat desa yang mengklaim hak atas sumber daya lokal dan menuntut keberlanjutan lingkungan. Pola relasi seperti ini menunjukkan bahwa fragmentasi politik lokal tidak hanya berbentuk persaingan antar lembaga formal, tetapi juga melibatkan hubungan informal dan patronase yang memengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat desa maupun kabupaten (Hadiz, 2014).

Ketimpangan fiskal di Pati menjadi salah satu sumber ketegangan yang signifikan antara pemerintah daerah dan masyarakat desa. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), terutama kenaikan hingga 250% pada tahun 2025, memberikan tekanan yang berat bagi warga desa, terutama petani dan pelaku ekonomi mikro (Detik, 2025). Kebijakan pajak yang diterapkan tanpa mekanisme konsultasi publik atau subsidi kompensasi ini memperlihatkan ketimpangan distribusi beban fiskal, di mana kelompok ekonomi lemah harus menanggung konsekuensi finansial yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok yang lebih mampu. Ketimpangan ini

diperparah oleh rendahnya transparansi alokasi dana pajak, sehingga warga sulit menilai manfaat langsung dari kontribusi mereka terhadap pembangunan lokal (Antlöv, 2019).

Kombinasi struktur ekonomi yang tergantung pada pertanian, relasi antara elit politik dan ekonomi bersifat patronase, serta ketimpangan fiskal menciptakan latar sosial politik yang rentan terhadap konflik dan mobilisasi masyarakat sipil. Dalam kondisi ini, masyarakat desa memiliki insentif kuat untuk berorganisasi dan membentuk gerakan kolektif guna melindungi kepentingan ekonomi mereka dan menuntut akuntabilitas pemerintah daerah. Fenomena ini menjadi konteks penting bagi munculnya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yang memanfaatkan momentum kebijakan kontroversial dan isu tambang ilegal untuk memperkuat kapasitas resiliensi warga dan mempertahankan ruang demokrasi lokal (Kusumawardhani, D. 2021).

Dengan kata lain, latar sosial politik Kabupaten Pati menunjukkan keterkaitan erat antara struktur ekonomi lokal, patronase politik, dan kebijakan fiskal yang tidak proporsional. Faktor-faktor ini membentuk kondisi yang mendorong masyarakat desa untuk berinovasi dalam strategi advokasi, membangun jejaring solidaritas, dan menggunakan simbol politik serta hukum sebagai alat perlawanan terhadap fragmentasi kekuasaan lokal. Pemahaman atas konteks ini sangat penting untuk menganalisis bagaimana gerakan masyarakat sipil seperti AMPB muncul dan mempertahankan relevansinya dalam menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang kompleks.

B. Lahirnya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB)

Pada tahun 2025, masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menghadapi dua isu utama yang memicu ketegangan sosial-politik, yaitu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250% dan maraknya praktik tambang ilegal di wilayah selatan Pati, khususnya di Kecamatan Sukolilo dan Kayen. Praktik ini menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial di tingkat desa. Kebijakan pajak yang signifikan ini diterapkan tanpa sosialisasi yang

memadai dan tanpa mekanisme konsultasi publik, sehingga menimbulkan ketidakpuasan luas di kalangan petani dan pelaku ekonomi mikro, yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal (BPS Kabupaten Pati, 2023).

Respon masyarakat terhadap kondisi ini berkembang menjadi solidaritas lintas desa yang kemudian membentuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) sebagai koalisi formal untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan menuntut keadilan fiskal serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Hadiz, 2010). Gerakan ini melibatkan berbagai aktor utama antara lain: petani sebagai kelompok terdampak langsung, tokoh masyarakat dan perangkat desa yang memiliki legitimasi sosial lokal, aktivis lingkungan yang memahami isu ekologis dan legal, serta mahasiswa yang berperan dalam advokasi hukum dan mobilisasi massa (Hadiz, 2010). Tokoh seperti Ahmad Husein, seorang aktivis lingkungan muda, dan Supriyono "Botok", tokoh masyarakat dengan pengaruh luas di kalangan petani dan buruh, memainkan peran sentral dalam koordinasi gerakan dan strategi advokasi (Purwoko, 2023).

Selain mobilisasi fisik melalui demonstrasi dan audiensi, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memanfaatkan media dan ruang digital sebagai kanal komunikasi dan pengorganisasian. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp digunakan untuk menyebarluaskan informasi, menggalang dukungan, dan memperluas jejaring solidaritas, termasuk diaspora Pati di luar daerah. Media lokal dan nasional seperti Lingkarjateng.id juga menjadi sarana untuk mempublikasikan isu yang dihadapi warga dan menekan pemerintah daerah agar lebih responsive (Lingkar Jateng, 2025).

Kronologi awal gerakan menunjukkan proses perkembangan yang sistematis: gerakan dimulai dari keluhan masyarakat terkait PBB-P2 di beberapa desa, kemudian berkembang menjadi koordinasi antar desa untuk membangun solidaritas kolektif. Hal ini tercermin dalam aksi-aksi besar seperti demonstrasi di Alun-Alun Pati, penggalangan dana untuk aksi ke Jakarta, serta audiensi dengan DPRD Kabupaten Pati. Solidaritas lintas desa ini menunjukkan bahwa masyarakat

lokal dapat mengatasi fragmentasi internal dan memaksimalkan kapasitas resiliensi untuk menghadapi kebijakan publik yang kontroversial.

Secara keseluruhan, lahirnya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pada tahun 2025 mencerminkan dinamika masyarakat sipil di tingkat lokal yang semakin kompleks, di mana aktor lokal mampu memadukan solidaritas tradisional, advokasi hukum, dan pemanfaatan media digital untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam interaksi dengan pemerintah daerah. Gerakan ini menegaskan bahwa perubahan sosial dan politik di tingkat lokal dapat terjadi melalui aksi kolektif yang terorganisir, berbasis kepentingan bersama, dan memanfaatkan strategi multi-level untuk mempertahankan ruang demokrasi dan menuntut akuntabilitas public (Carothers & Brechenmacher, 2014).

C. Strategi Adaptif Resiliensi Masyarakat Sipil

Dalam menghadapi fragmentasi politik-ekonomi di tingkat lokal, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mengembangkan strategi adaptif multi-level yang memadukan pendekatan lokal, hukum, simbolik, dan jejaring. Strategi ini memungkinkan masyarakat sipil untuk mempertahankan ruang demokrasi, mendorong akuntabilitas pemerintah daerah, dan memperkuat kapasitas resiliensi dalam menghadapi tekanan struktural.

1. Strategi Lokal: Mobilisasi Massa dan Solidaritas Lintas Desa

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mengorganisir masyarakat secara terstruktur melalui rapat desa, koordinasi lintas desa, dan penggalangan dukungan warga terdampak PBB-P2 serta tambang illegal. Demonstrasi besar di Alun-Alun Pati pada Agustus 2025 menjadi puncak mobilisasi, dengan partisipasi ribuan petani, buruh, dan warga desa yang sebelumnya bekerja secara terfragmentasi (Detik, 2025). Strategi ini menekankan pentingnya koordinasi horizontal antar komunitas lokal, sehingga fragmentasi internal dapat diminimalkan dan kekuatan kolektif masyarakat meningkat. Strategi ini tidak disukai oleh pemerintah yang berkuasa karena gerakan kolektif tersebut dianggap membahayakan kekuasaan negara. Respons pemerintah yang kurang dan masih besarnya pengawasan

berlebihan dari aparat menandakan iklim demokrasi di Indonesia yang belum stabil (Rahmawati D.2003). Meski tulisan Rahmawati ditulis pada tahun 2003, beberapa aspek strategi dan respon pemerintah masih cukup relevan dengan apa yang terjadi saat ini khususnya jika melihat pola mobilisasi massa dan solidaritas lintas desa di Pati dan bagaimana respon pemerintah daerah sebagai kepanjangan dari pemerintah pusat.

2. Strategi Hukum: Advokasi dan Tuntutan Formal

Secara paralel, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membentuk tim advokasi hukum untuk meninjau legalitas kenaikan PBB-P2 dan menyiapkan dokumen hak angket yang diajukan ke DPRD Pati (Berita Jateng, 2025). Pendekatan ini memanfaatkan instrumen hukum sebagai mekanisme pengawasan terhadap pemerintah daerah, sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya penggunaan jalur hukum dalam memperkuat posisi tawar masyarakat sipil terhadap otoritas lokal (Rifqi et al, 2023). Advokasi hukum ini juga memungkinkan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) untuk mendokumentasikan bukti-bukti pelanggaran administrasi dan lingkungan yang dapat digunakan untuk menekan pemerintah agar lebih akuntabel.

3. Strategi Simbolik: Penggunaan Momentum Budaya dan Narasi Publik

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memanfaatkan momentum Hari Tani, peringatan lokal, dan kegiatan budaya sebagai sarana untuk membangun legitimasi sosial dan memperluas dukungan publik (Jateng Antara News, 2025). Melalui aksi simbolik ini, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mengkomunikasikan tuntutan keadilan fiskal dan lingkungan dengan bahasa yang dapat diterima masyarakat luas, sekaligus menarik perhatian media. Literatur mengenai gerakan masyarakat sipil menunjukkan bahwa simbolisme dan narasi publik efektif dalam menciptakan pressure politik tanpa mengorbankan legitimasi Gerakan (Julius, 2014).

4. Strategi Jejaring: Pemanfaatan Media dan Kolaborasi Lintas Aktor

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) secara aktif menggunakan media sosial dan media lokal/nasional untuk menyebarkan informasi, menggalang dukungan, dan membangun narasi kolektif. Jejaring ini tidak hanya memperkuat mobilisasi lokal, tetapi juga menjangkau diaspora dan lembaga masyarakat sipil di tingkat regional maupun nasional. Kolaborasi lintas aktor—termasuk LSM, mahasiswa, dan tokoh masyarakat—menunjukkan pentingnya strategi jaringan sosial dalam meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat sipil menghadapi fragmentasi kekuasaan lokal.

Strategi multi-level yang diterapkan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) terbukti efektif. Kenaikan PBB-P2 akhirnya dibatalkan (Humas Pati, 2025). DPRD membentuk Panitia Khusus Hak Angket (Detik 2025), dan isu tambang ilegal menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Strategi ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil dapat memanfaatkan kombinasi pendekatan lokal, hukum, simbolik, dan jejaring untuk mempertahankan ruang demokrasi, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan membangun resiliensi terhadap krisis politik-ekonomi lokal.

Secara konseptual, pengalaman Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) sejalan dengan literatur mengenai resiliensi masyarakat sipil di negara-negara Global South, yang menekankan bahwa strategi adaptif multi-level memungkinkan gerakan lokal untuk menavigasi tekanan struktural dan fragmentasi kekuasaan tanpa kehilangan legitimasi sosial (Kamruzzaman, 2018). Meski begitu, perubahan kebijakan tersebut masih perlu membutuhkan pengawasan, apakah hanya untuk jangka pendek saja atau sesuai kesepakatan untuk jangka panjang.

D. Fragmentasi Politik dan Ekonomi di Tingkat Lokal

Pada Agustus 2025, kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% oleh Bupati Pati, Sudewo, memicu gelombang protes besar dari masyarakat. Kebijakan ini dianggap memberatkan warga, terutama petani dan masyarakat desa. Respons bupati yang terkesan arogan, seperti menantang balik demonstran hingga akhirnya memperburuk situasi dan memperdalam ketegangan antara lembaga eksekutif dan rakyat. Komunikasi yang buruk ini memicu ketegangan yang meluas dengan kehadiran media sosial sebagai media penyebarluasan narasi yang berkembang.

Sebagai respons terhadap protes masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan Bupati Sudewo. Meskipun langkah ini menunjukkan adanya mekanisme checks and balances, efektivitasnya terbatas. Beberapa pihak menilai bahwa Pansus ini lebih bersifat politis dan tidak sepenuhnya objektif dalam menilai kebijakan eksekutif.

Kabupaten Pati menghadapi ketimpangan fiskal akibat ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbatas. Hal ini memaksa pemerintah daerah harus mencari sumber pendapatan alternatif, salah satunya melalui pajak daerah. Namun, kebijakan tersebut menambah beban ekonomi masyarakat di tengah situasi ekonomi yang lesu di berbagai daerah. Selain itu, konflik kepentingan muncul terkait eksploitasi sumber daya alam, seperti tambang ilegal, yang melibatkan aktor politik lokal dan perusahaan swasta.

E. Bentuk Resiliensi dan Signifikansinya

Resiliensi masyarakat sipil dapat dipahami sebagai kemampuan kolektif untuk mempertahankan ruang publik dan memaksa negara merespons tuntutan warga. Di Kabupaten Pati, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menunjukkan kapasitas resiliensi ini melalui serangkaian aksi adaptif terhadap tekanan fiskal dan

eksploitasi sumber daya alam. Pendekatan multi-level yang mereka terapkan—lokal, hukum, simbolik, dan jejaring—memungkinkan masyarakat mempertahankan posisi tawar dan memanfaatkan ruang demokrasi yang tersedia, meskipun menghadapi fragmentasi politik dan ekonomi yang kompleks (Edwards, M., 2014).

Bentuk resiliensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) terlihat dalam keberhasilan parsial mereka. Pertama, gerakan ini berhasil mendorong pembatalan kenaikan PBB-P2 hingga 250%, melalui aksi demonstrasi terorganisir, audiensi dengan DPRD, dan penyampaian dokumen advokasi hukum. Kedua, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membuka ruang pengawasan terhadap praktik tambang ilegal di Sukolilo, memaksa pemerintah daerah membentuk tim terpadu untuk melakukan inspeksi dan menindak aktivitas pertambangan yang merugikan warga serta merusak lingkungan (Purwoko, 2023). Keberhasilan-keberhasilan ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil, meski secara struktural berada pada posisi lemah, dapat menggunakan strategi kolektif untuk memengaruhi kebijakan dan menegakkan hak-hak warga.

Meski demikian, keterbatasan struktural tetap menjadi hambatan signifikan bagi resiliensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Pertama, oligarki lokal dan jaringan patronase antara elit politik dan pengusaha tambang menimbulkan resistensi terhadap tuntutan masyarakat. Kedua, keterbatasan institusional, termasuk kapasitas DPRD yang terbatas dan ketergantungan pada eksekutif, membuat akuntabilitas pemerintah tetap parsial. Hal ini menandai bahwa resiliensi masyarakat sipil bersifat kontekstual dan terbatas; keberhasilan gerakan dapat bersifat temporer atau parsial, terutama ketika menghadapi struktur kekuasaan yang kuat dan saling terkait (Hadiz, 2014).

Secara keseluruhan, kasus Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menegaskan bahwa resiliensi masyarakat sipil di tingkat lokal bukan hanya tentang perlawanan spontan, tetapi merupakan hasil dari strategi adaptif yang terencana, penggunaan jejaring sosial dan hukum, serta pemanfaatan simbol politik untuk memperkuat

legitimasi. Temuan ini memperluas literatur mengenai masyarakat sipil di Indonesia, khususnya di wilayah non-urban, dengan menekankan pentingnya resiliensi multi-level dalam menghadapi fragmentasi politik-ekonomi dan menjaga ruang demokrasi yang masih terbuka.

Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) merupakan contoh nyata resiliensi masyarakat sipil di tengah fragmentasi politik dan ekonomi lokal. Melalui strategi adaptif multi-level yang melibatkan banyak aspek di tengah gerakan sipil seperti aksi lokal, advokasi hukum, pemanfaatan simbol politik, dan penguatan jejaring— Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) berhasil memaksa pemerintah daerah merespons tuntutan warga meski menghadapi keterbatasan institusional. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat lokal memiliki kapasitas untuk menegosiasikan hak-haknya dan memperjuangkan akuntabilitas negara, bahkan dalam kondisi struktur kekuasaan yang timpang.

Resiliensi masyarakat sipil Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) ini menunjukkan tren positif dalam iklim demokrasi di Indonesia dan bagaimana gerakan yang berasal dari lokal bukan wilayah urban mampu membuat perubahan kebijakan. Resiliensi ini muncul dari rakyat pinggiran yang merasa hak-haknya sebagai warga negara kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Resiliensi masyarakat sipil Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menjadi salah satu dari sekian banyak gerakan masyarakat sipil yang lahir dari kekecewaan terhadap pemerintah yang berkuasa. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) ini bisa menjadi inspirasi munculnya gerakan-gerakan serupa dan turut memengaruhi kondisi sosial politik di suatu daerah.

Referensi

Buku

Antlöv, H. (2019). "Village Governance and Local Politics in Indonesia." ISEAS Publishing.

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada) and their Effects*. NUS Press.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. (2023). *Kabupaten Pati dalam Angka 2023*. Pati: BPS.

BPS Kabupaten Pati. (2023). "Kabupaten Pati dalam Angka 2023". Pati: BPS.

Carothers, T., & Brechenmacher, S. (2014). "Closing Space: Democracy and Human Rights Support under Fire." Carnegie Endowment for International Peace.

Hadiz, V. R. (2010). "Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeaset Asia Perspective. Stanford University Press.

Hadiz, V. R. (2014). "Power and Politics in Contemporary Indonesia: Explaining the Dynamics of Democracy, Patronage, and Elites." Routledge.

Kamruzzaman, P. (Ed.). (2018). Civil Society in the Global South (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315113579

Leonardo Julius, P, "Memahami Transformasi Gerakan Simbolik: Study Kasus Aksi Kamisan." Tesis, UGM, 2014.

Artikel Jurnal

Afiff, Suraya, and Celia Lowe. "Claiming Indigenous Community: Political Discourse and Natural Resource Rights in Indonesia." *Alternatives: Global, Local, Political* 32, no. 1 (2007): 73–97. http://www.jstor.org/stable/40645203.

Edwards, M. (2014). "Civil Society." Polity Press. Lihat juga Walker, B., Holling, C. S., Carpenter, S. R., & Kinzig, A. (2004). "Resilience, adaptability and transformability in social–ecological systems." *Ecology and Society*, 9(2).

Kusumawardhani, D. (2021). "Resistensi Lokal terhadap Proyek Ekstraktif di Kulon Progo." *Jurnal Masyarakat dan Politik Lokal*, 7(2).

Purwoko, A. (2023). "*Tambang dan Politik Lokal di Pati: Studi Kasus Sukolilo*. Laporan Riset LSM Bumi Hijau.

Rahmawati D., "Gerakan Petani dalam Konteks Masyarakat Sipil Indonesia: Studi Kasus SeTAM", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,* UGM. Vol 6, No 3 (2003). https://doi.org/10.22146/jsp.11084.

Rifqi A, et al., "The Role of Legal Empowerment Based Advocacy for Rural Communities on Structural Social Inequality", *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services,* UNNES. Vol 5, No 2 (2023). https://doi.org/10.15294/ijals.v5i2.29864.

Berita Internet

"A-Z Kenaikan PBB 250% hingga Warga Pati Demo Tuntut Bupati Sudewo Lengser." Diakses pada 03 Oktober 2025 dari https://www.detik.com/jateng/berita/d-8058733/a-z-kenaikan-pbb-250-hingga-warga-pati-demo-tuntut-bupati-sudewo-lengser

"Bupati Lumajang soal Konflik Tambang Pasir Sumberwuluh: Kompleks Sekali." Diakses pada 03 Oktober 2025 dari https://surabaya.kompas.com/read/2022/07/05/105539978/bupati-lumajang-soal-konflik-tambang-"pasir-sumberwuluh-kompleks-sekali?page=all

"Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB-P2" diakses pada 04 Oktober 2025 dari https://humas.patikab.go.id/berita/detail/bupati-pati-batalkan-kenaikan-pbbp2

"Diperiksa Pansus, Camat di Pati Sebut Kenaikan PBB 250% Keputusan Bupati", diakses pada 03 Oktober 2025 dari https://www.detik.com/jateng/berita/d-8068615/diperiksa-pansus-camat-di-pati-sebut-kenaikan-pbb-250-keputusan-bupati

"Kenaikan Pajak 250% di Pati dari Kacamata Dosen Hukum" diakses pada 03 Oktober 2025 dari https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8063580/kenaikan-pajak-250-di-pati-dari-kacamata-dosen-hukum

"Polresta Pati Siapkan Ratusan Personel Untuk Amankan Aksi Hari Tani", diakses pada 03 Oktober 2025 dari https://jateng.antaranews.com/berita/601176/polresta-pati-siapkan-ratusan-personel-untuk-amankan-aksi-hari-tani

"Tindak Lanjuti Tuntutan Warga Pati, DPRD Sepakati Hak Angket" diakses pada 03 Oktober 2025 dari https://beritajateng.id/pati/tindak-lanjuti-tuntutan-warga-pati-dprd-sepakati-hak-angket/

"Warga Pati Protes Kenaikan PBB 250%, Sambat dari Rp 179 Ribu Jadi Rp 1,3 Juta". Diakses pada 03 Oktober 2025 dari https://www.detik.com/jateng/berita/d-8049489/warga-pati-protes-kenaikan-pbb-250-sambat-dari-rp-179-ribu-jadi-rp-1-3-juta

"Warga Semanggi Blora Hadang Truk Tambang Minyak, Dipicu Jalan Rusak." Diakses pada 03 Oktober 2025 dari https://beritajateng.id/blora/warga-semanggi-blora-hadang-truk-tambang-minyak-dipicu-jalan-rusak/